



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Praktik Baik Energi Surya untuk
Penyediaan Akses Energi di Komunitas
Desa, UMKM dan Pondok Pesantren

*Indonesia Solar Summit 2025:
Solarizing Indonesia: Powering
Equity, Economy and Climate Action*

Jakarta, 11 September 2025

Jateng Solar Province



Inovasi

Inovasi "Jateng Solar Province" bertujuan sebagai bentuk upaya mitigasi dampak perubahan iklim, dan sebagai Langkah akselerasi pemenuhan target bauran EBT sebesar 21,32% tahun 2025.



Pelibatan Multipihak

1. Pemerintah Pusat & Daerah
2. Lembaga Think Thank IESR
3. Industri dan UMKM
4. Lembaga Pendidikan & Pesantren
5. BUMN, BUMD & Lembaga Keuangan



Inklusivitas

Target program menysasar berbagai segmen yaitu industri, bisnis, komersial, rumah tangga dan sasaran publik. PLTS merupakan solusi peningkatan akses energi untuk masyarakat terpencil

Dampak Program

- ✓ Adanya peningkatan kapasitas PLTS atap di Jawa Tengah dari 0.1 MWp di 2019 hingga 53 MWp di 2025.
- ✓ Peningkatan liputan oleh media lokal dan nasional, serta apresiasi dari pemangku kepentingan nasional
- ✓ Ketertarikan Investor untuk berinvestasi PLTS Terapung di Jawa Tengah.
- ✓ Penganggaran melalui APBD untuk UMKM dan Pondok.

Tindaklanjut Program

- ✓ Menggalakkan kampanye dan penyebaran informasi penggunaan energi bersih (business forum)
- ✓ Meningkatkan inovasi teknologi PLTS dalam
- ✓ Melakukan advokasi dan mendorong instansi yang berwenang agar dapat segera menetapkan skema insentif untuk mendorong pertumbuhan EBT di Jawa Tengah
- ✓ Meningkatkan kapasitas SDM terkait pemasangan, operasional dan pemeliharaan
- ✓ Membuka central layanan dan informasi PLTS Atap di Jawa Tengah agar menarik investor

Contoh Praktik Penggunaan PLTS di Jawa Tengah

KOMUNAL

Pembangunan PLT Hybrid yang merupakan CSR dari Pertamina RU IV Cilacap di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap. PLT Hybrid dimanfaatkan untuk penerangan dan pembuatan produk kemasan. Kapasitas 42 kWp.



INDUSTRI



PLTS Atap di PT Tirta Investama diresmikan pada tanggal 29 September 2020 oleh Gubernur Jawa Tengah secara virtual dan dihadiri secara langsung oleh Pj Bupati Klaten. Kapasitas system yang terpasang di PT Tirta Investama adalah sebesar 2.912 KWp dengan perkiraan listrik yang dapat dihasilkan sebesar 4 GWh per tahun dan berkontribusi mengurangi emisi per tahun sebesar 3340 ton CO₂.

PONDOK PESANTREN



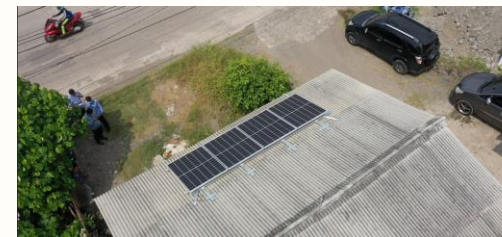
Pembangunan PLTS Rooftop di Pondok Pesantren Al Utsmani Kabupaten Pekalongan dengan kapasitas 4 kWp.

RUMAH SAKIT



Pembangunan PLTS Rooftop oleh PT JPEN di RSJD Dr Amino Gondohutomo melalui skema KSO dengan kapasitas 238 kWp. PLTS ini mulai beroperasi dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah pada 19 Agustus 2022.

UMKM



Pembangunan PLTS Rooftop Kelompok Tani Ternak Itik Berkah Abadi Kota Tegal. Kapasitas 2 kWp.

Tantangan Pengembangan PLTS di Daerah

ANGGARAN

Biaya investasi awal yang masih dirasa tinggi oleh masyarakat secara umum sehingga dalam pengembangan PLTS sebagian besar masyarakat masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.

TKDN

Kewajiban TKDN saat ini belum mengikuti arahan Bapak Presiden agar aturan TKDN dibuat fleksibel. Pengecualian TKDN untuk sektor EBT saat ini hanya pada tender yang dibiayai hibah luar negeri.

REGULASI

Adanya perubahan regulasi terkait implementasi PLTS atau Peraturan yang terus berubah menyebabkan perubahan signifikan perhitungan keekonomian bagi pengguna PLTS.

SEKTOR PENGGUNA

Perlunya mendorong pemanfaatan PLTS pada sektor lain seperti pertanian, perikanan dan perkebunan.



Peran Pemerintah Provinsi dalam Pembiayaan Kreatif

Pemerintah Provinsi mempunyai ruang yang cukup besar untuk mendorong pembiayaan kreatif dalam mempercepat adopsi PLTS. Beberapa peran strategis yang dapat dilakukan:

- Mendorong **CSR** perusahaan berupa pembangunan PLTS yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- Mendorong **BUMD** untuk turut berpartisipasi dalam **pembangunan PLTS atap** dengan mekanisme **KSO**.
- Mendorong **lembaga keuangan** untuk memberikan **kredit** bagi pembiayaan pembangunan PLTS.

Capaian Pembangkit Listrik EBT di Jawa Tengah



PLT Sampah	Jumlah (unit)	Kapasitas MW)
PLTSa	2	8,8



PLT Panas Bumi	Jumlah (unit)	Kapasitas (MW)
PLT Panas Bumi	2	72,8



PLT Hydro	Jumlah (unit)	Kapasitas (MW)
PLTA	30	319,44
PLTM	20	49,90
PLTMH	74	6,01

PLT Surya	Jumlah (unit)	Kapasitas
PLTS Komunal Off Grid	20	479 (kWp)
PLTS SHS (2013 – 2018)	575	33,1 (kWp)
PLTS Rooftop	799	53 MW
Pompa Air Tenaga Surya	11	98 kWp

Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dibutuhkan Pemerintah Daerah



Skema Net-Metering

Perlunya kompromi kebijakan untuk penggunaan skema net – metering berbasis kapasitas atau sektor pengguna misalnya skema net metering untuk sektor rumah tangga atau UMKM misalnya untuk yang daya terpasang PLN dibawah 5.500 VA.



Penambahan Periode Pendaftaran Kuota PLTS Atap

Penambahan periode pendaftaran kuota PLTS atap jika dimungkinkan menjadi 3 (tiga) kali setahun juga diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk memanfaatkan PLTS atap.



Relaksasi TKDN

Pengecualian TKDN untuk sektor EBT saat ini hanya pada tender yang dibiayai hibah luar negeri sehingga diperlukan dukungan Pemerintah Pusat untuk pengecualian TKDN bagi proyek dalam negeri skala kecil.